



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



**(RANCANGAN AKHIR RENJA)
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahkiim,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Rancangan Akhir Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Rancangan Akhir Renja) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2026 dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2026.

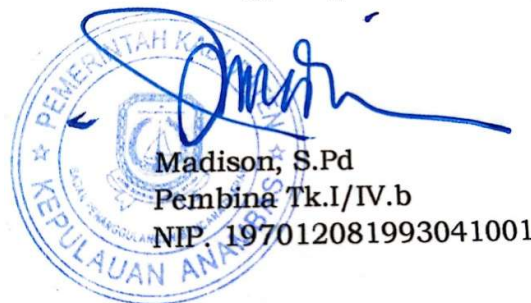
Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Rancangan Akhir Renja) Tahun 2026 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas .

Wassalamu'alaikum wr,wb.

Tarempa, 11 September 2025

Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah,



Madison, S.Pd
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197012081993041001

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AKHIR RENJA OPD TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja BPBD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPBD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD	11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD	14
2.4 Reviu terhadap Rancangan RKPD	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	21
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja BPBD Tahun 2026	21
3.3 Program dan Kegiatan	22
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	25
Bab V PENUTUP	28

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah menyusun dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga terkait, Rencana kerja dari Pemerintah Provinsi dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rancangan Akhir Renja (RANKHIR Renja) PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun. Sebagai dokumen rencana Tahunan, Rancangan Akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah penjabaran Rencana Kerja lima Tahunan berupa Renstra PD sehingga Rancangan Akhir Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan Tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rancangan Akhir Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Rancangan Akhir Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan kedalam perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026;
3. Rancangan Akhir Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan, merupakan rencana pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu :

“Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah melalui Pengembangan Pariwisata dan Perikanan yang Berbasis pada Potensi Lokal Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Inovatif”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi, sesuai dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan.;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesetaraan Gender serta Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur yang Merata.
3. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru.
4. Mempersiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, dan Mengembangkan Ekonomi Kreatif.
5. Memperkuat Reformasi Birokrasi.

Rancangan Akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan PD yang telah ditetapkan melalui prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian pembangunan secara berkala yang dalam penyusunannya memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 640/16/SJ Tahun 2021 penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2026, mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih sebagai hasil pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2022.
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 77);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 487).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pembuatan Rencana Kerja (Rancangan Akhir Renja) dimaksudkan dalam rangka menentukan arah dan pedoman dalam melaksanakan rencana kegiatan Tahunan dalam jangka 1 (satu) Tahun yang akan dimuat dalam Renstra Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Rancangan Akhir Renja) Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 ini adalah :

1. Sebagai acuan Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) Tahun perencanaan. Adanya kesinambungan antara RPJMD , Renstra SKPD dan Rancangan Renja SKPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Rancangan Akhir Renja OPD Tahun lalu dan capaian Renstra OPD), analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan Akhir RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Renja OPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai program dan kegiatan yang berisikan program, kegiatan, indikator, pagu indikatif dan pagu prakiraan maju Tahun depan.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENJA PD TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AKHIR RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Pada bagian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dan diperkirakan capaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2026. Fungsi Evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi-informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Rancangan Akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 serta realisasi target sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026. Selain itu juga dilakukan review terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 dan proyeksi realisasi Anggaran Tahun 2026.

Pada Tahun Anggaran 2025, APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebesar Rp. 9.571.333.728 dengan 2 (dua) program dan 11 (sepuluh) kegiatan. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan keseluruhan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 12.745.770.421 Berikut ini Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Tabel 2.1) serta Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel 2.2) sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Tahun 2026

No	Program	No	Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Rancangan Akhir Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026

		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	PROGRAM PENANGGULAN GAN BENCANA	8	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		9	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		10	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		11	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah s/d Tahun 2026 Kabupaten Kepulauan Anambas

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7 / 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Tersedianya Dokumen Perencanaan	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	100%	100%	8 Dokumen	100%	100%

Rancangan Akhir Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026

	Daerah									
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	1 Paket	100%	1 Paket	100%	100%	1 Paket	100%	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Rancangan Akhir Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026

		Urusan Pemerintahan Daerah								
	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Penanggulangan Bencana yang Tertangani	90%	95%	92%	100%	100%	90%	90%	100%
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota tersedia	10 Pelayanan (Dokumen)	9 Pelayanan (Dokumen)	15 Pelayanan (Dokumen)	100%	100%	10 Pelayanan (Dokumen)	10 Pelayanan (Dokumen)	100%
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	27 Kegiatan	16 Kegiatan	20 Kegiatan	100%	100%	27 Kegiatan	27 Kegiatan	100%
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	85%	90%	87%	100%	100%	85%	85%	100%
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	87%	92%	89%	100%	100%	87%	87%	100%

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas dan kewajiban rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana Secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang belum ada secara menetap
2. Ketersediaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang belum memadai
3. Belum adanya pelatihan penanganan dan Penanggulangan dalam menghadapi bencana secara *massif* dan menggandeng lintas sektor serta masyarakat
4. Belum terbentuknya peningkatan peran lintas sektor dan penggalangan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana
5. Belum Maksimalnya Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
6. Belum maksimalnya gudang penyimpanan logistik penanggulangan bencana
7. Perlu adanya peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk kegiatan lapangan
8. Perlu adanya kegiatan simulasi kebencanaan yang melibatkan lintas sektor (Basarnas, TNI, Polri, serta relawan bencana), agar

tercipta *trust* antar tim penanggulangan bencana

9. Perlu adanya Standar Operasional Prosedur dalam penanggulangan bencana
10. Perlu adanya kegiatan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam penanganan bencana
11. Belum adanya Kajian Kebutuhan Pasca Bencana untuk mengidentifikasi dampak dari kejadian bencana

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan Tahunan yang dilaksanakan, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Rancangan Akhir Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12		16	17		
1	Predikat AKIP	-	-	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	-
2	Nilai AKIP	-	-	76.00%	77.00%	78.00%	80.00%	75.00%	77.00%	78.00%	75.00 %	76.00%	-	
3	Indeks Resiko Bencana	-	-	83,65	82,93	82,22	81,5	83,65	82,93	82,22	89.87	83,65	-	
4	Indeks Ketahanan Daerah	-	-	0.46	0.47	0.47	0.49	0.46	0.47	0.47	0.45	0.46	-	

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran strategis dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana yang dapat berdampak signifikan terhadap keselamatan, kesejahteraan, dan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas dihadapkan pada berbagai permasalahan dan isu strategis yang kompleks dan dinamis. Permasalahan tersebut meliputi tantangan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan kondisi geografis, keterbatasan sumber daya, perkembangan teknologi, dan dampak perubahan iklim.

Isu strategis yang muncul mencakup perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi peran serta masyarakat, serta pengembangan strategi adaptif yang berbasis data dan teknologi. Keseluruhan tantangan ini menuntut pendekatan perencanaan yang komprehensif dan responsif agar BPBD mampu menjalankan perannya secara optimal dalam menciptakan Kabupaten Kepulauan Anambas yang tangguh terhadap bencana.

Melalui pengidentifikasian permasalahan dan isu strategis secara menyeluruh, BPBD berupaya untuk menyusun kebijakan dan program yang mampu menjawab kebutuhan penanggulangan bencana secara efektif dan berkelanjutan, sekaligus mendukung visi pembangunan daerah yang aman, sejahtera, dan berorientasi pada keberlanjutan.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN ROKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 lebih ditekankan kepada peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan *leading sector* penanggulangan bencana dan membantu Bupati

Rancangan Akhir Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026

Kepulauan Anambas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan bencana.

Review terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 hanya menitikberatkan pada analisa kebutuhan Tahun rencana. Perbandingan antara Rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 dengan hasil analisa kebutuhan tidak memiliki perbedaan baik dari tolak ukur dan pagu indikatif dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun anggaran 2026. Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Rancangan Akhir Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026

Tabel 2.4. Alokasi Plafon Anggaran Sementara Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026

Rancangan RKPD					Kebutuhan Analisis Kebutuhan				
Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	KKA	8 Dokuen	1.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	KKA	8 Dokuen	10.678.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KKA	100%	11.794.640.421.18	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KKA	100%	11.987.132.672
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KKA	1 Paket	0	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KKA	1 Paket	0

Rancangan Akhir Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KKA	100%	216.428.308	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KKA	100%	314.183.743
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	100%	196.835.775	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	100%	335.858.611
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	100%	80.720.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	100%	69.828.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	100%	56.500.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	100%	48.640.000

Rancangan Akhir Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026

Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Penanggulangan Bencana yang Tertangani				Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Penanggulangan Bencana yang Tertangani			
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota tersedia	KKA	10 Pelayanan (Dokumen)	20.000.000	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota tersedia	KKA	10 Pelayanan (Dokumen)	390.440.000
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	KKA	27 Kegiatan	189.645.917	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	KKA	27 Kegiatan	352.009.063
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	KKA	85%	60.000.000	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	KKA	85%	58.210.113
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	KKA	87%	130.000.000	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	KKA	87%	372.192.800

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari pengembangan penelitian dan pelaksanaan musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten sebagai agenda rutinitas Tahunan dalam perencanaan pembangunan. Pada Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 tidak terdapat usulan program/kegiatan dari masyarakat. Program/kegiatan yang diajukan pada Rancangan Renja adalah rutinitas perencanaan pembangunan dan inisiatif dari Pemerintah Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

l. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Mengenai prioritas dan sasaran pembangunan nasional, hal tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/ Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan dapat tercapai.

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam pembangunan nasional Indonesia lima Tahun kedepan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan kedepannya juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan

masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan teknologi sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

b. Telahaan Terhadap Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan dokumen RPJMD pembangunan daerah diarahkan pada “Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastruktur serta pengembangan pusat kebudayaan melayu Kepri”. Prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

Dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan menengah atas, penguatan promotif dan preventif kesehatan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.

2. Pengembangan ekonomi kerakyatan

Dengan fokus pada pengembangan koperasi dan UMKM, pembangunan dan pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar), pengembangan perdagangan, peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan wilayah provinsi, peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan, pengembangan pariwisata bahari.

3. Pengembangan pusat kebudayaan melayu

Dengan fokus pada penyediaan prasarana dan sarana penunjang pusat kebudayaan melayu, dan peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah.

4. Pengembangan infrastruktur wilayah

Dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana

perhubungandarat, laut, dan udara, peningkatan kualitas jalan provinsi, peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase) peningkatan sarana prasarana air bersih, peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan, peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan ruang terbuka hijau

5. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN RENJA PD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai.

melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat tercapai. Sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan *leading sector* penanggulangan bencana dan membantu Bupati Kepulauan Anambas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan bencana. Untuk itu, disusun kebijakan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, kebijakan strategis yang disusun harus dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2026–2030. Visi yang harus didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026-2030 adalah

:

“Kepulauan Anambas yang Bedaya Saing , Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026–2030, sasaran dalam menunjang visi misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

- Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana (Kajian Resiko Bencana dan Penanganan Resiko Bencana);
- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang mengacu pada Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Terwujudnya Ketahanan Daerah yang Tangguh

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada Visi Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, maka program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah lebih menitikberatkan pada hal Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah melalui Pengembangan Pariwisata dan Perikanan yang Berbasis pada Potensi Lokal Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Inovatif. Dimana faktor tersebut dapat dicapai melalui Program/Kegiatan yang telah dirumuskan oleh Badan Penanggulangan Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten guna Mendukung tercapainya Prioritas Pembangunan yaitu:

“ Mewujudkan Anambas Sebagai Hunian yang Nyaman”.

Sebaran lokasi dari jumlah program dan kegiatan yang direncanakan, paling banyak terdapat di ibu kota Kabupaten yaitu Tarempa hal ini dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bencana. Sebagai OPD yang memastikan terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, hampir semua program/ kegiatan yang sasarannya adalah seluruh daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk lebih jelasnya, Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4. 1.

Mengenai prioritas dan sasaran pembangunan nasional, hal tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/ Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan dapat tercapai. Program dan Kegiatan yang dirancang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f) Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penanggulangan Bencana

- a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten/Kota
- b) Kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- c) Kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d) Kegiatan Penataan sistem dasar penanggulangan bencana

Masih terdapat beberapa kendala dalam penganggaran di subkegiatan, terutama pada Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang dari beberapa tahun yang lalu mengalami kekurangan anggaran sehingga berdampak pada tidak maksimalnya penyaluran bantuan sosial masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2026 DAN
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS**

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan dasar									
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
Program Urusan Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Pemerintah	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah							
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan	KKA	8 Dokumen	1.000.000	DAU		8 Dokumen	20.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKA	8 Dokumen	500.000	DAU		8 Dokumen	19.500.000
2	Penyelenggaraan Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya WALIDATA Pendukung ststistik sektoral daerah	KKA	100%	250.000	DAU		100%	250.000
3	Pelaksanaan Pengumpulan data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan data statistik sektoral daerah	KKA	100%	250.000	DAU		100%	250.000

Rancangan Akhir Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KKA	100%	11.794.640.421.18	DAU		100%	11.892.028.125
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	100%	11.625.770.421.18	DAU		100%	11.742.028.125
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	100%	168.870.000	DAU		100%	150.000.000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	KKA	1 Paket	0	DAU		1 Paket	7.354.083
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KKA	1 Paket	0	DAU		1 Paket	7.354.083
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KKA	100%	216.428.308	DAU		100%	181.003.541
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	KKA	28	1.358.295	DAU		28	3.000.000
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	KKA	100%	152.513.833	DAU		100%	38.003.541
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	KKA	100%	7.079.580	DAU		100%	20.000.000
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KKA	100%	13.152.600	DAU		100%	20.000.000

Rancangan Akhir Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026

11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	KKA	100%	10.418.000	DAU		100%	20.000.000
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	100%	31.906.000	DAU		100%	80.000.000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KKA	100%	196.835.775	DAU		100%	330.000.000
13	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	KKA	1 Unit	0	DAU		1 Unit	40.000.000
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	KKA	1 Unit	0	DAU		1 Unit	30.000.000
15	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KKA	1 Paket	0	DAU		1 Paket	20.000.000
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	KKA	1 Paket	196.835.775	DAU		1 Paket	230.000.000
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	KKA	100%	0	DAU		100%	10.000.000

Rancangan Akhir Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	100%	80.720.000	DAU		100%	70.000.000
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KKA	100%	60.720.000	DAU		100%	70.000.000
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KKA	100%	20.000.000	DAU		100%	0
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Peersentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	100%	210.210.730	DAU		100%	50.000.000
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KKA	100%	40.480.000	DAU		100%	20.000.000
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KKA	100%	16.020.000	DAU		100%	30.000.000
Program Penanggulangan Bencana		Jumlah Bulan terpenuhinya Program Penanggulangan Bencana							
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Pelayanan informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota tersedia	KKA	10 Pelayanan (Dokumen)	20.000.000	DAU		9 Pelayanan (Dokumen)	120.000.000

Rancangan Akhir Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026

22	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	KKA	6000 Orang	20.000.000	DAU		6500 Orang	120.000.000
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	KKA	27 Kegiatan	189.645.917	DAU		23 Kegiatan	405.000.000
23	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	KKA	1 Paket	109.645.917	DAU		1 Paket	85.000.000
24	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	KKA	1 Dokumen	20.000.000	DAU		1 Dokumen	85.000.000
25	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	KKA	30 Orang/Personil	20.000.000	DAU		30 Orang/Personil	80.000.000
26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di	KKA	50 Laporan/Aduan	20.000.000	DAU		50 Laporan/Aduan	80.000.000

Rancangan Akhir Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026

		kawasan tempat tinggalnya							
27	Pelatihan pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	KKA	1 Kegiatan	20.000.000	DAU		1 Kegiatan	75.000.000
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	KKA	85%	60.000.000	DAU		87%	235.000.000
28	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	KKA	1 Dokumen/SK	20.000.000	DAU		1 Dokumen/SK	75.000.000
29	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	KKA	50 Orang/Korban	20.000.000	DAU		50 Orang/Korban	80.000.000
30	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	KKA	50 Orang/Korban	20.000.000	DAU		50 Orang/Korban	80.000.000
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	KKA	87%	130.000.000	DAU		87%	211.881.245

Rancangan Akhir Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026

31	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	KKA	1 Dokumen	20.000.000	DAU		2 Dokumen	70.000.000
32	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	KKA	25 Keluarga	110.000.000	DAU		26 Keluarga	141.881.245
Jumlah					12.745.770.421.18				13.522.266.994

Jumlah Program : 2
 Jumlah Kegiatan : 11
 Jumlah Sub Kegiatan : 32

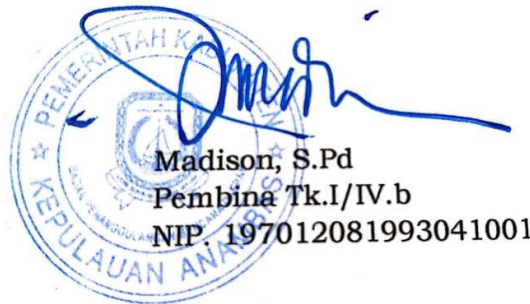
BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Rancangan Akhir Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Rancangan Akhir Renja) selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, Rencana Kerja (Rancangan Akhir Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu Tahun bagi seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Kerja (Rancangan Akhir Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Tarempa, 11 September 2025

Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah,



Madison, S.Pd
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197012081993041001